KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAG LEGISLATIF KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH
Studi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2014

Oleh:
LAILATUL MONAWARAH[1*]
NIM. E1051131069

Prof. Dr. AB. Tangdililing, MA[2], Drs. Abi Sofyan, M.Si[2]

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
2. Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

*Email: lailatul.monawarah@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan hambatan terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga legislatif Kabupaten Sukamara Kalimanntan Tengah. Metode ini yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, walaupun secara formal keanggotaan legislatif perempuan masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi,akan tetapi menunjukan adanya keterwakilan politik yang baik. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Dan budaya patriarki memegang peranan dalam pemerintahan politik, walaupun sulit diubah namun sedikit demi sedikit telah mengalami pergeseran nilai mengenai kedudukan dan peran kaum perempuan. Ada empat faktor yang menyebabkan penghambat keterwakilan politik perempuan seperti: kendala sisitem politik, sosial budaya, ekonomi, psikologis menunjukan bahwa kendala sisitem politik yang menjadi penghambat dalam mengikuti pemilihan umum legislatif.

Kata-kata Kunci: Keterwakilan Perempuan,Faktor Penghambat,Pemilu Legislatif

Abstract

This thesis aimed to describe the obstacles on women's representation in the Legislature of Sukamara Regency Central Kalimantan. The method used is descriptive qualitative method. Although formally women's representation in the legislature was still below 30%, but is still showed a good political representation. Patriarchal culture dominated people's lives, even in the smallest environment like family, the nuances of male domination is really strong. And patriarchal culture hold the role in political goverment. Although difficult to change, but slowly there is a shift in the value of women's role and position. There are four factors inhibiting women's representation in politics namely: politics system, social-culture, economy, psychology. The result shows that politics system became the obstacle for women to get involve in legislative election.

Keywords: Women's Representation, Inhitibing Factor, Legislative Election

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Label dan cap diberikan pada sosok perempuan yang sangat kental sebagai orang lemah, telah di doktrin secara turun-temurun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama berhubungan dengan konteks buda ya di Indonesia yangmasih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki.

Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-organisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999 (Matland, 2001).

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kouta 30% masih wacana kontroversi. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk member ruang gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam dunia politik.

Lahirnya kuota perempuan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum, pasal 65 ayat 1 menyatakan “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Namun dalam prakteknya, partai politik terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan.

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Sebenarnya perempuan biasa menembus apasaja dengan kualitas yang dimlikinya. Perempuan mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai Presiden dan wilayah publik yang signifikan.

Fungsi keterwakilan politik ini sangatlah berpengaruh penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas sebagai wakil rakyat. Pemimpin yang berkualitas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu suara rakyat terwakili, kepentingan rakyat terakomodasi, terciptanya tranparansi dan pemerintahan yang bersih. Fungsi partai politik disini juga nanti untuk menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk duduk dalam pemerintahan, seperti DPRD, DPD, DPR dan lain-lain.

Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu tahun 2014, menunjukan suatu kebijakan dalam rangka upaya menarik atau mengumpulkan sejumlah kaum perempuan yang berpotensi mengisi jabatan yang kosong dalam lembaga atau kursi DPRD nantinya, agar dapat menggagas peran-peran perempuan, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (Pemilu), menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen.

Selain itu, kurangnya percaya diri suatu penyebab utama atas kurangnya keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik. Dan kurangnya sumber pendananan terlihat dari kondisi ekonomi beberapa caleg, faktor lainnya yang menjadi kelemahan caleg perempuan adalah sifat hemat yang dimilikinya,sehingga menjadi penghalang apabila harus berhadapan dengan kenyataan harus mengeluarkan biaya yang banyak. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang keterwakilan politik perempuan di parleman yang dalam hal ini adalah DPRD khususnya di Kabupaten Sukamara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah adalah "Apa faktor penghambat rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2019?".

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Sukamara yaitu: (1) Kendala Sistem Politik, (2) Realis Sosial-Budaya, (3) Hambatan Psikologis, (4) Sosial dan Ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Keterwakilan Politik

Salah satu konsep politik yang dapat perhatian seksama dari kalangan ilmuwandan praktisi politik, yaitu konsep keterwakilan. Konsep ini merujuk pada seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara, bertindak atau memperjuangkan hak politik atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Proses ini disebut dengan perwakilan yang bersifat politik *(political representation).* Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat ini pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik.

Definisi perwakilan atau representasi sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Haris (2008) yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), di mana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Argument tersebut juga menunjukan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda, 2008:1). Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang di wakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi maka harus mampu meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kebijakan untuk bicara dan berindak atas nama suatu kelompok besar lebih besar (Budiardjo, 1996:175).Bila dilihat dari sejarah politik dan proses pembangunan

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

politik, konsep demokrasi perwakilan sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kondisi pertumbuhan dan perkembangan penduduk, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sangat mustahil untuk tetap menerapkan mekanisme dan sistem demokrasi langsung. Pada sisi lain, konsep perwakilan ini pun merupakan jawaban terhadap kebutuhan negara modern yang pada umumnya memiliki wilayah yang sangat besar. Kenyataan ini membuat demikrasi langsung menjadi pilihan yang sulit dalam sistem pemerintahan, sehingga konsepsi keterwakilan mau tidak mau menjadi pilihan yang sangat realistik.

2. Kuota 30 Persen Perempuan

Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam keterwakilan kaum perempuan adalah sistem kouta. Dengan sistem kouta ini diharapkan posisi perempuan dapat lebih terwakili. Hal ini mengingat bahwa keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan. Logikanya, semakin banyak suara perempuan yang masuk ke parlemen, maka kepentingan perempuan akan semakin terakomodasi.

Ide inti dibalik sistem kouta adalah merekrut perempuan untuk masuk kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar sedikit tanda dalam kehidupan politik. Sistem kouta bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan, paling tidak merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority)* yang terdiri dari 30 atau 40 persen (Dahlerup, dalam Ballington, 2002:14).

Keterlibatan perempuan dalam politik sebagian besar yang mengkaji dan berfokus pada analisa tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Ada kajian yang melihat persoalannya ada pula isu keterlibatan dalam politik dan dalam membutuhkan dukungan finansial serta *network* yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru yang memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi, serta pendukung. Hambatan yang bersifat struktural ini menjadi penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Ada pula kajian yang berfokus pada hambatan tata nilai, lembaga dan tradisi, serta kewajiban yang sepihak yang membuat gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik akan membuat perempuan tidak memperolah dukungan simbolik dari perannya. Kewajiban-kewajiban *dometic* dan *cuktural* yang memberatkan perempuan akan

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

mengurangi kesempatan dan dukungan substansi bagi keterlibatan perempuan.

Selanjutnya ada pula berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai faktor yang menghambat aktivitasnya di dunia politik. Minimnya kesempatan untuk menambah kapasitasnya dalam politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi masa, berkomunikasi, mengorganisasi lembaga, merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kempanye, merancang kebijkan, merancang evaluasi kebijakan, dan lain-lainnya.

Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, individual. Kajian terhadap kaderisasi perempuan dalam politik selanjutnya akan dikaji aspirasi dari perempuan terhadap politik dan partai politik.

Selain itu perwakilan perempuan sebagai wakil atau yang diwakili. Dalam teori ini, menurut (Darwin, 2005: 53) dapat menjelaskan adanya empat bentuk kemungkinan hubungan dalam memaknai relasi antara wakil dengan terwakil yaitu, pertama *trusthe model, delegation model, mandat model,* dan *politico model.*

3. Faktor Penghambat Keterwakilan Kaum Perempuan di Dunia Politik

Rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan berperspektif gender. Dalam hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Menurut Ratnawati (2004: 302) perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan sering kali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Melainkan lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada posisi marginal.

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan kaum perempuan diparlemen yaitu masih berada dibawah proporsi *(under-represented)* mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik yang kurang diperhatian. Hal ini sebagaimana dinyatakan ole Sri Lestari Rahayu (2001-69) bahwa terdapat empat kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat di

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut: kendala pertama adalah kendala sistem poltik, meliputi ; (1) model maskulin yang mendominasi wanita politik dimana laki-laki lebih menentukan standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan peremouan poltik. (2) kurangnya dukungan partai dan rendahnya rekrutmen kader politik perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi perempuan dumana peryaratan pencalonan masih diwarnai karakterisitik kaum laki-laki, (3) lemahnya kerjasama dengan oragnisasi perempuan, (4) ketiadaan sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader perempuan dan, (5) sistem pemilihan (distrik atau proporsional) yang akan menguntungkan kaum perempuan. Kendala kedua adalah menyangkut realitas sosial budaya yakni anggapa adanya dominasi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik wilayah domestik maupun publik yang masih kuat, sehingga menyebabkan adanya *stereotip* terhadap perempuan yang ingin masuk atau berkarir di dunia politik. Kendala ketiga adalah hambatab psikologis, yakni ketakutan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan. Dan kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, buta huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik, serta beban ganda perempuan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Menurut Faisal (2012: 12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi sekarang ini.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Sukamara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukamara dengan alasan bahwa di Kab.Sukamara anggota DPRD masih rendah atau belum memenuhi kouta 30% keterwakilan perempuan. Dan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer dengan mengacu kepada suatu panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang membahas tentang faktor penghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kab.Sukamara periode 2014-2016.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian dan didukung oleh alat, arsip-arsip dan dokumen.

4. Teknik Analisis Data

1) Tahap Reduksi Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dilakukan pemisahan, dipilih hal-hal yang pokok dan lebih difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Data yang sudah dipilah-pilah untuk segera diolah sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan untuk melengkapi pada tahap penarikan kesimpulan.

3) Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam analisis data kualitatif, kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang didukung oleh kondisi-kondisi yang kuat dan relavan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Keabsahan

Untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian itu sah dan benar maka diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi untuk menguji keabsahan data. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara serempak.

Kemudian oleh Denzin (Maleong:2007:330), triangulasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

D. PEMBAHASAN

1. Kendala Sistem Politik

Tantangan pertama (1) adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri,yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih, yakni angka pendapatan suara di suatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan. Di sini persaingan caleg perempuan akan berat mengahadapi sesama caleg perempuan dari partai lain dan dengan caleg laki-laki dalam memperebutkan sedikit kursi tersedia. Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus di perhatikan karena tidak ada gunanya kalau calon legislatif berada di urutan bawah, sementara kursi yang diperebutkan di suatu pemilihan hanya tiga kursi. Di sinilah kepiawaian caleg perempuan di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia politik sangat rendah.

Partai politik sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota 30% perempuan yang harus di penuhi. Ada alasan serupa yang diungkapkan oleh Ibu SW (Caleg tidak terpilih) bahwa :”Pertama, dengan sistem pemilu proposional terbuka dalam pemilu 2014, perempuan bakal calon bukan hanya harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon. Kedua, daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih”.

Kendala kedua (2) adalah kurangnya dukungan partai politik. Seperti diketahui bahwa perempuan memainkan peran penting dalam kempanye dan memobilisasi dukungan dipartai-partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

memperoleh dukungan dari kegiatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Ibu JM (caleg tidak terpilih) menyatakan bahwa:"Rendahnya dukungan baik fasilitas ataupun moril serta keterbatasan pendidikan dan juga pendapatan dari masing-masing calon legeslatif. Masih maraknya budaya patriaki. Kendala lainnya karena adanya aturan dalam partai politik tertentu yang tidak memperbolehkan perempuan untuk duduk di pucuk pimpinan tertentu".

Kendala ketiga (3) Kurangnya Promosi. Dengan sistem baru pemilu yang diterapkan, persaingan antar partai politik untuk memperoleh suara terbanyak menjadi sangat ketat, hal ini di karenakan setiap partai berusaha memperoleh sebanyak mungkin kursi di legislatif guna menempatkan kader-kadernya. Selain persaingan di dalam tubuh partai, di mana setiap calon legislatif yang di usung oleh partai akan bersaing dengan calon lainnya.

Kurangnya promosi yang dilakukan oleh partai politik terhadap setiap caleg khususnya perempuan yang di alami Ibu TS (Caleg tidak terpilih): "Selama saya mengikuti pemilihan legislatif 2014 yang kemarin, saya belum banyak dikenal oleh masyarakat. Dan saya sudah melakukan usaha yang maksimal secara individu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mendapatkan suara"

Kendala keempat (4) pengembangan kapasistas perempuan. Dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia, perempuan harus berhadapan dengan masalah kapsitas dalam hal dunia politik, sementara itu kapasitas laki-laki tidak pernah dipetanyakan. Konsekuensinya adalah caleg perempuan harus memiliki program kerja yang terfokus dan jelas,serta harus dilengkapi dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan media, berkempanye, mengemas isu kempanye, dan lain-lainnya.

Kendala kelima (5) penominasian perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Di dalam tubuh sebagian partai politik masih terlihat kurangnya demokrasi, dimana sebagian partai politik tidak memiliki kriteria nominasi kandidat yang transparan, terukur dan terpercaya. Terkait dengan hal tersebut, terdapat bahaya juga bahwa partai politik yang tidak mampu menarik perempuan tidak akan dapat memenuhi penempatan angka nominasi minimal 30%. Sebagai implikasinya, harus adanya tekanan untuk memastikan agar proses nominasi kandidat memenuhi kriteria yang transparan, terpercaya, dan terukur,

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

serta untuk memastikan adanya dorongan bagi partai politik untuk mengrekruit perempuan yang berada di luar keanggotaan partai.

Hasil wawancara Ketua DPD Partai Golkar Bapak EA mangatakan bahwa: ”Jumlah partai politik yang ikut bersaing dalam pemilihan caleg untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhinya tingkat representasi perempuan karena setiap partai setiap partai biasa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen. Ada juga kecenderungan untuk berbagi jumlah kursi yang terbatas itu di antara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat perempuan”.

2. Kendala Sosial Budaya

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarki, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestic dengan tanggung jawab urusan rumah tangga. Selain itu juga Berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.

Ketua DPC Partai PDIP Bapak MY mengatakan yaitu “kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain di sebabkan oleh kondisi budaya yang patrikal yang berarti tidak diimbangi dengan kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota, GBHN, dan berbagai instrument politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukan diskriminasi terhadap perempuan”.

3. Kendala Psikologis

Terlepas dari berbedaan antara laki - laki dan perempuan. Sejak dari Budaya sampai Social dan Ekonomi dapat menjadi hambatan psikologis bagi calon legeslatif karena ditakutkan gagal tidak terpilih, selain itu kurangnya kesadaran dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat di bidang politik dan rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap keberadaan perempuan di lembaga legislatif serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan yang berkarir di bidang politik.

Adanya argument kalau perempuan merupakan mahluk yang tidak lengkap, sehingga mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan kelompok laki-laki, sehingga manakala mereka diberi pekerjaan yang sama dengan kaum pria mereka merasa tidak cukup mampu dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, perempuan hanya baik dan sukses apabila menjalankan kodratnya sebagai makhluk reproduksi semata dan bukan bekerja di bidang pemerintahan.

Menurut Ibu HS (caleg terpilih) bahwa faktor yang paling berat saya rasakan ketika ikut serta dalam pemilu legislatif saat kemarin. Bagaimana keluarga saya terutama suami, anak- anak saya serta orang tua agar dapat memberikan dukungan saya, dan bagaimana saya dapat membagi waktu dengan keluarga dan pekerjaan. Saya ingin membuktikan persepsi bahwa perempuan mampu untuk bersaing di dunia politik dan bukan sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Disisi lain saya ingin mengetahui tentang politik dan partai dalam memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang turut ambil bagian dalam pemilu.

4. Kendala Sosial Ekonomi

Faktor penghambat yang lain adalah ketergantungan ekonomi wanita terhadap laki-laki. Ketergantungan ekonomi membuat wanita lemah dalam aspek yang lain, termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Sebagian besar politisi wanita juga terbentur masalah ketergantungan ekonomi. Kampanye politik membutuhkan dana yang tidak sedikit, di tingkat yang paling rendah (pemilihan ketua desa) sekalipun. Wanita yang secara ekonomi sangat tergantung pada laki-laki tentu saja akan menemui hambatan besar masalah pendanaan kampanye ini. Meskipun ia memiliki kualifikasi sebagai tokoh politik yang potensial, wanita yang tidak mandiri secara ekonomi tidak dapat berbuat banyak, sehingga dukungan dari keluarga atau suami sangat dibutuhkan guna mencukupi kebutuhan sosial ekonomi para caleg perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Ibu HS (Caleg terpilih) berpendapat bahwa: “Yang paling berat saya rasakan dalam mengikuti pemilu legislatif kemarin adalah masalah ekonomi. Dikarenakan bahwa saya harus mendanai diri saya sendiri dan juga saat ini saya sebagai pimpinanan

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

partai politik yang memerlukan biaya sebagai partai perserta pemilu. Namun, banyaknya biaya yang saya keluarkan selama mengikuti caleg kemarin".

Kurangnya pendanaan dan beban ganda partisispasi perempuan dalam ruang publik politik dibatasi juga dengan pendidikan, dan kurangnya akses informasi. Sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga. Kaum perempuan tidak mampu memikirkan bagaimana mereka turut serta dalam ruang-ruang publik oleh karena kesibukan dengan kegiatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Umumnya mereka yang ikut sebagai caleg hanya mengandalkan motivasi dari pribadi.

E. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor politik adalah kurangnya dukunganS parpol terhadap perempuan. Secara lebih spesifik, sistem politik dan partai-partai politik Indonesia dinilai sangat tidak peka jender. Akibatnya, kaum perempuan berikut isu-isu yang menyangkut diri mereka menjadi diremehkan.
2. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya faktor social - Budaya yang menganggap perempuan hanya tepat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran ini jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik.
3. Hambatan bagi perempuan dapat terjadi karena Kurangnya peran serta perempuan dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor Psikologis yang fundamental,
4. Kurangnya sistem pendukung dan basis dukungan bagi kaum dan kelompok-kelompok perempuan juga disoroti sebagai kendala besar terhadap partisipasi politik perempuan, belum ada satupun organisasi yang bisa berperan melakukan koordinasi pembentukan basis dukungan ini secara baik, termasuk partai politik.
5. Faktor penghambat yang lain adalah ketergantungan ekonomi wanita terhadap laki-laki. Ketergantungan ekonomi membuat wanita lemah dalam

LAILATUL MONAWARAH, NIM. E1051131069
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

aspek yang lain, termasuk kemandirian dalam mengambil keputusan, akses sosial, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

F. SARAN

1. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan-hambatan yang ada, terlebih hambatan tersebut erat kaitannya dengan budaya, dan ideologi yang telah tertanam di masyarakat , pemerintah perlu memberikan solusi seperti memberikan kesadaran publik melalui pendidikan kewarganegaraan dan pemilih; reformasi hukum, politik, kepemiluan, dan kelembagaan; dukungan kapasitas; dan pengembangan jejaring dan koalisi.
2. Dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan, perlu melakukan pendekatan perempuan ke Partai agar partai mau mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan antara lain:
   a. Partai mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perempuan seperti memberikan pendidikan dan pengkaderan politik
   b. Partai mengeluarkan kebijakan yang menyadarkan pemilih akan pentingnya memilih wakil-wakil rakyat yang berpihak kepada perempuan
   c. Partai didorong untuk menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam partai
   d. Partai harus merekruit caleg perempuan dengan Kriteria khusus yaitu caleg perempuan yang memiliki amanah Pemilu.
3. Pemberdayaan perempuan perlu di tingkatkan terutama pendidikan politik perempuan. Untuk sebagai wadah kaum perempuan guna memperoleh pengetahuan yang banyak tentang dunia politik agar perempuan mendapatkan akses yang sama dalam partisipasi di bidang politik. Perlu meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu aktif dalam setiap organisasi agar dapat melatih diri menjadi pemimpin politik.

G. REFERENSI

Anugrah, Astrid S.H, ”***Keterwakil Perempuan Dalam Politik***”, Jakarta : Pancuran Alam,2009

Moleong, lexy.J. 2006. "***Metode penelitian kualita tif***". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono, 2007. "***Memahami penelitian kulitatif***". Bandung: penerbit CV Alfabeta

Sugito,dkk.2011. ***Pedoman Penulisan Skripsi***. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Sri Lestari Rahayu,2004.*"**Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Kuota 30% bagi Perempuan***

Budiarjo, Miriam, "***Dasar-Dasar Ilmu Politik***", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Mari Rosiena.2013. Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di

Kabupaten Malinau,Kaltim pada tahun 2009-2014. Universitas Mulawarman

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	:	Lailatul Manawarah
NIM / Periode lulus	:	E1051131069 / 2017
Tanggal Lulus	:	28 Juli 2017
Fakultas/ Jurusan	:	Fisip / Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Ilmu Politik
E-mail addres/ HP	:	lailatul-manawarah@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
■ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal .....

Dr. Turmudi, S.Sos, M.Si
NIP 19710805 19990 1001

Dibuat di :
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Lailatul Manawarah
NIM. E1051131069

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociadev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

Reguler